



PMI DIY Telusuri Tagihan Rp7,2 M

Ada Dugaan Berkas Laporan Keuangan PMI Kota Yogya Dihilangkan

YOGYA, TRIBUN - PMI DIY meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit keuangan di PMI Kota Yogyakarta. Hal ini setelah muncul tagihan dari vendor sejumlah Rp7,2 miliar.

"Kami menginventarisasi karyawan untuk mengetahui permasalahan (PMI Kota Yogyakarta). Setelah itu timbul suatu kesimpulan sementara, ada tagihan sangat besar," kata GBPH Prabukusumo kepada awak media, Rabu (15/3).

Alas temuan tersebut, pihaknya sudah berkonsolidasi kepada Wali Kota Yogyakarta atau Penjabat Wali Kota Yogyakarta, serta aparat penegak hukum. "Mereka tidak sanggup karena dokumen dihilangkan. Dicecah-caceh, entah dikemanakan. Terakhir nanti kami akan mencoba ke Kepolisian," ujarnya.

Sejauh ini belum diketahui apakah dana Rp7,2 miliar tersebut disalahgunakan oleh segelintir oknum atau terjadi kesalahan pelaporan keuangan di PMI Kota Yogyakarta. Hal ini lah yang masih menjadi tanda tanya sebab dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan tagihan sebesar itu diduga dihilangkan.

"Kami mencoba ke BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), tetapi jika BPKP tidak sanggup, kami akan lapor Polisi," jelasnya.

Upaya tegas itu akan dilakukan sebab menurut Gusti Prabu, dengan jalur hukum inilah dapat dibongkar aliran dana sebesar Rp7,2 miliar itu. "Ada 10 rekening PMI Kota Yogyakarta yang sudah kami bekukan. Kalau lapor Polisi nanti itu bisa dibuka. Siapa yang melakukan pengambilan uang nanti akan dapat dilihat," ujarnya.

Persoalan tagihan itulah yang membuat polemik di internal PMI Kota Yogya mulai memekam titik terang. Sebagaimana diketahui gugatan perdata dugaan upaya melawan hukum peraturan organisasi PMI lantaran PMI DIY tak kunjung mengeluarkan SK pengesahan pengurus PMI 2021-2026 memasuki persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada September 2021.

Pihak tergugat adalah Gusti Bendoro Pangeran Harjo (GBPH) Prabukusumo selaku ketua PMI DIY yang dinilai enggan menandatangani SK pengesahan karena suatu alasan. Sementara pengugat yakni salah satu relawan PMI



JADI MISTERI

- PMI DIY akan mengaudit keuangan di PMI Kota Yogyakarta.
- Muncul tagihan dari vendor sejumlah Rp7,2 miliar.
- Tagihan besar ini membuat Ketua PMI DIY tidak segera mengesahkan pengurus baru.
- Laporan keuangan periode 2016-2021 diduga dihilangkan.
- PMI DIY juga tidak segan-segan untuk menempuh jalur hukum.

Herode Poerwadi turut menanggapi terkait kegagalan pengelolaan keuangan PMI Kota Yogyakarta. Herode terpilih sebagai Ketua PMI Kota Yogyakarta pada 2021 dan mulai bertugas pada 2022.

Namun tidak berlangsung lama kemudian pihaknya mengundurkan diri sebagai ketua terpilih karena ada beberapa sebab. Menurut pengakuannya, sejak terpilih sebagai Ketua PMI Kota Yogyakarta dirinya belum pernah mendapatkan berkas serah terima jabatan dari pengurus PMI Kota Yogyakarta periode 2016-2021.

"Sudah beberapa kali saya sebagai ketua terpilih (ketua yg belum menerima SK, menurut AD ART PMI) meminta agar ada serah terima jabatan berupa berkas yg diperlukan termasuk berkas laporan keuangan. Tetapi sampai sekarang juga belum diberi," katanya.

Pihaknya sudah beberapa kali meminta dilakukannya cut off atau pengalihan pengelolaan keuangan PMI Kota Yogyakarta dari pengurus 2016-2021 kepada ketua terpilih Herode Poerwadi.

Saat itu Herode meminta dokumen pengelolaan keuangan, buku-buku rekening dan cek untuk diserahkan kepada ketua terpilih. "Tetapi sampai sekarang juga saya belum mendapatkan itu, sampai saya mengundurkan diri, buku rekening dan cek-cek keuangan masih dipegang oleh pengurus PMI 2016-2021 atau pemegang spesimen," ungkapnya.

Padahal tujuan Herode meminta laporan keuangan itu agar pihaknya mengetahui posisi keuangan dan dana yang dimiliki PMI Kota Yogyakarta sebagai bakal perencanaan kegiatan dan operasional PMI Kota Yogyakarta.

PMI Kota Yogyakarta sempat beberapa kali tidak lancar memproses pengolahan darah untuk pasien. Hal itu terjadi karena vendor mengurangi pasokan bahan reagen untuk mengolah darah," ujarnya. (hda)

Kota Yogyakarta. Dalam perjalanan sidang, PN Sleman tidak dapat menerima gugatan tersebut. Selanjutnya pihak pengugat mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta namun hasilnya tidak terbukti adanya upaya melawan hukum dari Ketua PMI DIY. Pdt Ketua PMI Yogyakarta Haka Astana Mantika W menjelaskan langkah yang akan ditempuh untuk menelusuri uang senilai Rp7,2 miliar itu sederhana. "Sederhana saja, kami inventarisir lewat akuntan publik BPKP. Terakhir jika sudah terpaksa dan dipaksa, saya akan meminta tolong teman-teman di Ring Road (Polda DIY) untuk kasus ini," ujar mantan Kapolda DIY ini. Haka menjelaskan dokumen keuangan PMI Kota Yogyakarta yang hilang yakni tahun 2016 dan 2021. "Itu ditangani pengurus sejak 2006. Berarti tiga periode kepengurusan. Yang hilang dokumen 2016 dan 2021," tegasnya. **Undur diri** Ketua PMI Kota Yogyakarta terpilih

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PMI Cab. Kota Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005